

**EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2010-2014**



NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun oleh :

AGUNG SLAMET SUKARDI

B 300 110 067

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGRAN 2010-2014
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

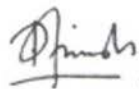
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

AGUNG SLAMET SUKARDI
B300110067

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing



SITI FATIMAH NURHAYATI SE., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2010-2014

Oleh
AGUNG SLAMET SUKARDI
B300110067

Telah dipertahankan dewan penguji
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari senin, 28 maret 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Ir. Maulidiyah Indira H, M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Daryono Soebagyo, Mcc
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Didit Pornomo SE., M.Si.
(Anggota II Dewan Penguji)



dekan




Dr. Triyono, M.Si

PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta 19-04-2016



Agung Slamet Sukardi
B300110067

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Bandung dengan judul penelitian “Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010-2014”. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah kota Bandung adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio efektifitas dan untuk pemetaan keuangan daerah menggunakan indeks Growth, Share dan Elastisitas.

Hasil analisis dari perhitungan rasio selama kurun waktu 2010-2014 diperoleh hasil. Tingkat kemandirian keuangan daerah kota Bandung menunjukkan rata-rata sebesar 63,29%, sehingga kota Bandung masuk dalam kategori yang sangat kurang. Tingkat ketergantungan keuangan daerah menunjukkan rata-rata sebesar 46,86%, sehingga masuk dalam tingkat ketergantungan yang tinggi. Tingkat derajat desentralisasi fiskal diperoleh rata-rata sebesar 28,15%, sehingga pemerintah kota Bandung masuk dalam kategori sedang. Tingkat efektifitas pendapatan daerah diperoleh rata-rata sebesar 113,21% masuk dalam kategori sangat efektif.

Dari hasil perhitungan indeks kinerja keuangan daerah (IKK) dan metode kuadran maka menunjukkan hasil perhitungan Indeks kemampuan keuangan kota Bandung tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014, skala indeks menunjukkan angka 62,736. Ini berarti kemampuan keuangan kota Bandung tergolong tinggi. Dari hasil perhitungan *share* dan *growth* terhadap ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Bandung tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014, maka diperoleh data *share* sebesar 59,926% dan *growth* sebesar 58,983%. Selanjutnya dilakukan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran. Posisi kota Bandung berada pada kuadran II. Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi.

Kata kunci: rasio kemandirian, rasio ketergantungan daerah, rasio desentralisasi

ABSTRACT

This research is a descriptive study describing and analyzing the data obtained. The object of this research is the Government of Bandung with the title "Performance Evaluation of Local Government Finance Anggaran Bandung Year 2010-2014". Analyser used to measure the performance of the financial management of the area the city is the area of financial independence ratio, the ratio of the area of financial dependency, the ratio of the degree of fiscal decentralization and effectiveness ratio and for mapping regional financial indices using Growth, Share and elasticity.

The results of the analysis of the calculation of the ratio during the period of 2010-2014 diperoleh hasil. The level of financial independence Bandung city area showed an average sebesar 63.29%, so the city of Bandung sign kalam category sangat less. The level of financial dependence region showed an average of 46.86%, sehingga entered the high level of dependency. The degree of fiscal decentralization gained an average of 28.15%, so the city government into the category of being. The level of effectiveness of local revenue earned an average of 113.21% in the category very effective.

From the calculation of the financial performance of the index (CCI) and the quadrant method menunjukkan financial capability index calculation results Bandung fiscal year 2010 through 2014, the scale index indicates the number 62.736. This means that the financial capacity of the city of Bandung is high. From the calculation of the share and the growth of the budget summary income and expenditure Bandung fiscal year 2010 through 2014, the obtained data is a share of 59.926% and a growth of 58.983%. Further mapping of regional financial capability based on the quadrant method. The position of the city of Bandung is in quadrant II. These conditions have not been ideal, but the region has the potential pengembangan.

Keywords: self-sufficiency ratio, the dependency ratio area, the ratio of decentralization

A. PENDAHULUAN

Pengertian otonomi daerah menurut Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah (Otda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut Halim (dalam Sijabat dkk, 2013), dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah *self supporting* di dalam bidang keuangan. Artinya daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Hal iniseseuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan diperkuat dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Syamsi,1986).

Tabel 4-1 STRUKTUR APBD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010-2014

STRUKTUR APBD	2010	2011	2012	2013	2014
PENDAPATAN	2.440.168.435	3.115.296.524	3.666.693.410	4.332.088.947	5.657.000.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	441.871.142	833.254.175	1.005.583.425	1.442.775.239	1.989.000.000
Pendapatan Pajak Daerah	301.781.988	667.106.812	820.563.651	1.194.087.447	1.631.000.000
Hasil Retribusi Daerah	86.471.549	71.684.532	78.649.880	115.508.351	140.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.298.097	10.328.428	78.649.880	12.069.973	20.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.319.508	84.134.403	99.142.827	121.109.468	216.000.000
DANA PERIMBANGAN	1.459.244.805	1.406.734.260	1.807.075.186	1.778.972.208	2.205.000.000
Ddana hasil pajak	479.601.255	332.336.537	421.210.327	201.110.042	
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.556.206	24.447.635	25.136.357	24.608.604	309.000.000
Dana Alokasi Umum	912.571.834	1.005.642.188	1.323.681.042	1.485.941.032	1.821.000.000
Dana Alokasi Khusus	51.515.510	44.307.900	37.047.460	67.312.530	75.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	539.052.488	875.308.089	854.034.799	1.110.341.500	1.463.000.000

BELANJA	2.522.680.818	3.080.347.679	3.490.035.508	4.027.469.180	5.985.360.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.629.163.528	1.863.118.079	2.106.950.225	2.115.995.405	2.841.220.000
Belanja Pegawai	1.238.514.783	1.418.329.256	1.634.604.768	1.791.058.169	2.845.770.561
belanja bunga	75.945	-	-	-	-
Belanja Subsidi	45.125.500	57.625.500	62.055.500	95.875.317	102.870.000
Belanja Hibah	263.490.455	328.978.668	408.328.643	207.644.277	141.079.561
Belanja Bantuan Sosial	79.607.120	55.725.565	383.851	19.951.732	90.000.000
Belanja Bagi hasil	-	-	-	-	-
Belanja bantuan keuangan	-	-	814.045	814.045	1.000.000
pengeluaran tidak terduga	2.349.725	2.459.090	763.418	651.865	20.500.000
BELANJA LANGSUNG	893.517.290	1.217.229.600	1.383.085.283	1.911.473.775	3.144.140.000
Belanja Pegawai	91.072.053	102.878.882	110.083.026	162.473.775	339.349.699
Belanja Barang dan Jasa	396.745.753	502.268.828	466.337.223	684.295.757	1.413.165.502
Belanja Modal	405.699.484	612.081.890	806.665.039	1.064.845.440	1.391.622.551
PEMBIAYAAN DAERAH	289.986.289	311.508.975	470.417.732	737.078.916	10.000.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	372.498.672	276.560.130	293.759.835	432.459.149	338.360.000

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kinerja keuangan daerah pemerintah kota bandung tahun anggaran 2010-2014 diukur dari tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan daerah, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat efektivitas PAD dan tingkat efisiensi PAD?.
2. Bagaimanakah kemampuan keuangan daerah pemerintah kota bandung tahun anggaran 2010-2014 diukur melalui *share* dan *growth* angaran pendapatan dan belanja baerah (APBD), indeks kemampuan keuangan (IKK) dan peta kemampuan keuangan?

C. METODE PENELITIAN

1. Teknik Analisis Data

Adapun formulasi untuk rasio kemandirian keuangan daerah, rasio tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan daerah, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat efektivitas PAD. Masing-masing adalah sebagai berikut (Halim, 2011):

a. Rasio Kemandirian

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah. Dengan Formulasi sebagai berikut :

$$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{Dana perimbangan}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap Pendapatan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Efektifitas pendapatan asli daerah (PAD)

Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang akan dicapai. Tingkat efektifitas dalam penelitian ini diukur dengan realisasi pendapatan daerah terhadap target penerimaan pendapatan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Efektifitas:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Target penerimaan pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Adapun Kemampuan keuangan daerah diukur dengan menghitung rata-rata dari indeks *share*, *growth*, elastisitas berikut ini rumus dari masing –masing indeks.

a. *Share*

Share adalah indikator ukuran untuk mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan belanja pembangunan daerah. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

Indeks *share*

$$\text{Index Share} = \frac{\text{Nilai share hasil perhitungan} - \text{nilai share minimum}}{\text{nilai share maksimum} - \text{nilai share minimum}} \times 100\%$$

b. *Growth*

Ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam

mendapatkan .pendapatan asli daerah (PAD) dari periode ke periode.
Dengan formulasi sebagai berikut :

$$Growth = \frac{PAD_i}{PAD_i - 1} \times 100\%$$

Indek *growth*

$$IndexGrowth = \frac{\text{nilai } growth \text{ hasil pengukursn} - \text{nilai } growth \text{ minimum}}{\text{nilai } growth \text{ maxximum} - \text{nilai } growth \text{ minimum}} \times 100\%$$

c. *Elastisitas*

Elastisitas adalah ukuran yang menggambarkan sensitivitas atau elastisitas pad terhadap perkembangan ekonomi dengan formulasi sebagai berikut:

$$Elastisitas = \frac{Growth}{\text{Pertumbuhan Ekonomi}} \times 100\%$$

Indeks *elastisitas*

$$\text{Index Elastisitas} = \frac{\text{nilai } elastisitas \text{ hasil pengukuran} - \text{nilai } elastisitas \text{ minimum}}{\text{nilai } elastisitas \text{ maxximum} - \text{nilai } elastisitas \text{ minimum}} \times 100\%$$

d. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Adapun metode indeks kemampuan keuangan merupakan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan *growth*, indeks elastisitas dan indeks *Share*. Dengan demikian formula IKK adalah:

$$IKK = (XG + XE + XS) / 3$$

Keterangan :

XG = Indeks Pertumbuhan

XE = Indeks *Elastisitas*

XS = Indeks *Share*

TABEL 3-6
Kreteria Tingkst Kemampuan Keuangn Daerah

Indeks Kemampuan Keuang Darah	Klasifikasi
0,00-0,33	Rendah
0,34-0,43	Sedang
0,41-1,00	Tinggi

Sumber: Bappenas, 2003

e. Peta Kemampuann Keuangan

Peta Kemampuann Keuangan berdasarkan meode kuadran, terbagi menjadi empat kuadran dengan kondisi masing-masing tercantum dalam tabel 3-7.

Tabel 3-7.

Peta Kemampuan Keungan Daerah Berdasarkan Metode Kuandran

Rata-rata <i>Growth</i> (%)		
Rata-rata	KUADRAN II	KUADRAN I
	<i>Share</i> : Rendah	<i>Share</i> : Tinggi
	<i>Growth</i> : Tinggi	<i>Growth</i> : Tinggi
<i>Share</i> (%)	KUADRAN IV	KUADRAN III
	<i>Share</i> : Rendah	<i>Share</i> : Tinggi
	<i>Growth</i> : Rendah	<i>Growth</i> : Rendah

Sumber: Bapenas 2003

Berdasarkan peta kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran maka dapat dikelompokkan status kemampuan keuangan dengan kriteria atau kondisi seperti pada tabel 3-

Tabel 3-8.

Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja, dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PAD nya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah

Sumber: Bapenas 2003

D. Hasil Analisis Data Penelitian

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai pemerintah sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Pelaksanaan otonomi dikatakan berhasil dan tidaknya, salah satunya bisa terlihat dari tingkat kemandirian suatu daerah yang diukur dari rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap dana perimbangan. Hasil perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah kota Bandung dapat dilihat pada tabel 4-3

Tabel 4-3

Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung 2010-2014

Tahun	Pad (Rp 000)	Dana perimbangan (Rp 000)	Rasio kemandirian (%)
2010	441,871,142	1,459,244,805	30.28
2011	833,254,175	1,406,734,260	59.23
2012	1,005,583,425	1,807,075,186	55.65
2013	1,442,775,239	1,778,972,208	81.10
2014	1,989,000,000	2,205,000,000	90.20
Rata-rata			63.29

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada tabel 4-3 di atas dapat diketahui bahwa pada periode tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan prosentase yang berfluktuatif. dari lima tahun perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2010 tingkat rasio kemandirian menunjukkan prosentase yang rendah yaitu sebesar 30,28% dan tahun 2014 tingkat rasio kemandirian menunjukkan prosentase yang tertinggi yaitu sebesar 90,20%

Adapun rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah kota Bandung tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 63,29% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria pada tabel 4-3 maka kota Bandung masuk dalam kategori tingkat kemandirian keuangan daerah sangat kurang artinya kota Bandung memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan, hal ini menunjukkan dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dengan maksimal.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemajuan suatu daerah bisa terlihat dari aktifitas pembangunan baik dari infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang suatu kegiatan pemerintah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah tersebut yang terlihat dari rasio dana perimbangan terhadap pendapatan daerah. Hasil perhitungan tingkat ketergantungan keuangan daerah kota Bandung tahun anggaran 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 4-5

Tabel 4-5
Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Bandung 2010-2014

Tahun	Dana perimbangan (Rp 000)	Pendapatan daerah (Rp 000)	Rasio ketergantungan (%)
2010	1,459,244,805	2,440,168,435	59.80
2011	1,406,734,260	3,115,296,524	45.16
2012	1,807,075,186	3,666,693,410	49.28
2013	1,778,972,208	4,332,088,947	41.06
2014	2,205,000,000	5,657,000,000	38.98
Rata-rata			46.86

Sumber: data sekunder yang diolah

Tingkat ketergantungan keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4-5 menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berfluktuatif. Tingkat ketergantungan keuangan daerah kota Bandung pada tahun 2014 menunjukkan prosentase tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah yang rendah sebesar 38,98% dan tahun 2010 adalah tahun yang menunjukkan prosentase rasio ketergantungan keuangan daerah yang tertinggi yaitu sebesar 59,80%.

Adapun rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah kota Bandung tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan prosentase sebesar 46,86%. Sehingga diklasifikasikan dalam kategori tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan lainnya belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, diukur dengan cara PAD dibandingkan dengan Pendapatan Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan suatu pembangunan dapat kita lihat dari rasio PAD terhadap pendapatan daerah. Hasil perhitungan tingkat desentralisasi fiskal kota Bandung tahun anggaran 2010-2014 dapat dilihat di tabel 4-7

Tabel 4-7
Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Bandung 2010-2014

Tahun	PAD (Rp 000)	Pendapatan daerah (Rp 000)	Rasio desentralisasi fiskal (%)
2010	441,871,142	2,440,168,435	18.11
2011	833,254,175	3,115,296,524	26.75
2012	1,005,583,425	3,666,693,410	27.42
2013	1,442,775,239	4,332,088,947	33.30
2014	1,989,000,000	5,657,000,000	35.16
Rata-Rata			28.15

Sumber : data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4-7 di atas dapat diketahui bahwa perhitungan rasio desentralisasi fiskal dari tahun 2010 sampai tahun 2014 menunjukkan prosentase yang meningkat di setiap tahunnya. Dari lima tahun perhitungan rasio desentralisasi fiskal pada tahun 2010 adalah rasio dengan tingkat yang rendah yaitu sebesar 18,11% dan tahun 2014 menunjukkan prosentase rasio derajat desentralisasi fiskal yang tinggi yaitu sebesar 35,16%

Berdasarkan hasil perhitungan selama periode 2010 sampai dengan 2014 diperoleh rata-rata sebesar 28,15%, sehingga pemerintah kota Bandung masuk dalam kategori sedang, hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, serta peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri kurang dari 50%. Dengan kata lain mengindikasikan kurangnya kemampuan pemerintah daerah kota Bandung dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi.

4. Rasio efektifitas pendapatan daerah

Tingkat efektifitas suatu daerah terlihat dari pencapaian tujuan realisasi pendapatan dan target-target yang dicapai dalam suatu periode pemerintahan daerah yang diukur melalui rasio pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah. Hasil perhitungan tingkat efektifitas keuangan daerah kota Bandung tahun anggaran 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 4-9

Tabel 4-9
Rasio Tingkat Efektifitas APBD Daerah Kota Bandung 2010-2014

Tahun	Total pendapatan daerah (Rp 000)	Target pendapatan daerah (Rp 000)	Rasio efektifitas (%)
2010	2,440,168,435	2,092,322,619	116.62
2011	3,115,296,524	2,592,627,155	120.16
2012	3,666,693,410	3,390,453,856	108.15
2013	4,332,088,947	4,167,933,633	103.94
2014	5,657,000,000	4,827,742,559	117.18
Rata-rata			113.21

Sumber : data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4-9 di atas menunjukkan bahwa rasio efektifitas kota Bandung dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 adalah tahun yang menunjukkan prosentase rasio efektifitas yang rendah yaitu sebesar 103,94% masuk dalam kategori sangat efektif dan tahun 2011 menunjukkan prosentase rasio efektifitas yang tertinggi yaitu sebesar 120,16% masuk dalam kategori sangat efektif

Adapun rata-rata tingkat efektifitas kota Bandung tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014 sebesar 113,21% masuk dalam kategori sangat efektif. Artinya kinerja kota Bandung bagus, terbukti dalam mencapai tujuan yang ditargetkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, berarti pemerintah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan mampu untuk membiayai kegiatan sendiri tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat.

Pemetaan Keuangan Dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Metode Kuadran.

a. *Growth*

Growth adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempetahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dari periode ke periode. Hasil pengukuran indeks *growth* dapat dilihat pada tabel 4-10

Tabel 4-10 Indeks *Growth*

Tahun	<i>Growt</i>	Kondisi Max <i>Growth</i> (%)	Kondisi Min <i>Growth</i> (%)	Indeks <i>Growth</i> (%)
2010	540,723	540,723	212,900	100,000
2011	212,900	540,723	212,900	-
2012	583,525	540,723	212,900	113,056
2013	330,010	540,723	212,900	35,723
2014	364,136	540,723	212,900	46,133
Jumlah				294,913
Rata-rata				58,983

Sumber: data sekunder yang diolah

Dengan hasil perhitungan tabel 4-10 pada tahun 2010-2014 kota Bandung memiliki rata-rata *growt* sebesar 59,983

b. *Share*

Share adalah indikator ukuran untuk mengukur seberapa jauh kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan belanja pembangunan daerah. Adapun hasil pengukuran indeks *share* dapat dilihat pada tabel 4-11

Tabel 4-11 Indeks *Share*

Tahun	<i>Share</i>	Kondisi Max <i>Share</i> (%)	Kondisi min <i>share</i> (%)	Indeks <i>share</i> (%)
2010	17,516	35,823	17,516	0,000
2011	27,051	35,823	17,516	52,081
2012	28,813	35,823	17,516	61,707
2013	35,823	35,823	17,516	100,000
2014	33,231	35,823	17,516	85,840
Jumlah				299,629
Rata-rata				59,926

Sumber : data sekunder yang diolah

Dengan melihat hasil perhitungan pada tabel 4-11 kota Bandung menunjukkan rata- rata sebesar 59,926

c. indeks *elasstisitas*

Elastisitas adalah ukuran yang menggambarkan sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi. Nilai yang menunjukkan elastisitas pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Bandung sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintah bisa dilihat dari hasil rata-rata indeks elastisitas. Adapun hasil perhitungan t indeks elastisitas dapat dilihat pada tabel 4-12

Tabel 4-12 indeks *elastisitas*

Tahun	<i>Elastisitas</i>	Kondisi max <i>elastisitas</i> (%)	Kondisi min <i>elastisitas</i> (%)	Indeks <i>elastisitas</i> (%)
2010	49,453	158,076	49,453	0,000
2011	146,081	158,076	49,453	88,957
2012	137,541	158,076	49,453	81,094
2013	132,486	158,076	49,453	76,441
2014	158,076	158,076	49,453	100,000
jumlah				346,493
rata-rata				69,299

Sumber : data sekunder yang diolah

Dengan hasil perhitungan pada tabel 4-12 menunjukkan rata-rata indeks elastisitas sebesar 69,299

Dari hasil perhitungan *share* dan *growth* terhadap ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Bandung tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014, maka diperoleh data *share* sebesar 59,926% dan *growth* sebesar 58,983% kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran, posisi kota Bandung berada pada kuadran II, yaitu kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Sumbangan PAD terhadap total belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Ini berarti pemerintah daerah kota Bandung masih dapat menggali potensi daerah lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data APBD kota Bandung tahun anggran 2010-2014 dengan menggunakan indikator kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal dan tingkat efektifitas pendapatan daerah dapat disimpulkan:

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun yaitu menunjukkan rata-rata sebear 63,29%, sehingga kota Bandung masuk kalam kategori yang sangat kurang, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Bandung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

2. Tingkat ketergantungan keuangan

Tingkat ketergantungan keuangan daerah kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun yaitu menunjukkan rata-rata sebesar 46,86%, sehingga kota Bandung masuk dalam kategori tingkat ketergantungan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan lainnya belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

3. Derajat desentralisasi fiskal

Berdasarkan hasil perhitungan selama periode 2010 sampai dengan 2014 diperoleh rata-rata sebesar 28,15%, sehingga pemerintah kota Bandung masuk dalam kategori sedang. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, serta peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri kurang dari 50%. Dengan kata lain mengindikasikan kurangnya kemampuan pemerintah daerah kota Bandung dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi.

4. Efektivitas pendapatan daerah

Berdasarkan hasil perhitungan selama periode 2010 sampai dengan 2014 diperoleh rata-rata sebesar 113,21% masuk dalam kategori sangat efektif. Artinya kota Bandung kinerja yang bagus, terbukti dalam mencapai tujuan yang ditargetkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berarti pemerintah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan mampu untuk membiayai kegiatan sendiri tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah kota Bandung tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014 dengan indeks kinerja keuangan daerah (IKK) dan metode kuadran maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai indeks kemampuan keuangan daerah

Dilihat dari hasil perhitungan Indeks kemampuan keuangan kota Bandung tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014, skala indeks menunjukkan angka 62,736. Ini berarti kemampuan keuangan kota Bandung tergolong tinggi. Tingginya tingkat kemampuan keuangan pemerintah daerah kota Bandung disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

2. Peta kemampuan keuangan daerah

Dari hasil perhitungan *share* dan *growth* terhadap ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Bandung tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014, maka diperoleh data *share* sebesar 59,926% dan *growth* sebesar 58,983%. Selanjutnya dilakukan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran. Posisi kota Bandung berada pada kuadran II. Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal. Sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Sumbangan PAD terhadap total belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Ini berarti pemerintah daerah kota Bandung masih dapat menggali potensi daerah lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah daerah kota Bandung

Pemerintah kota Bandung hendaknya lebih meningkatkan pengelolaan potensi yang dimiliki oleh kota Bandung karena mempunyai dampak yang besar tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat kota Bandung. Jika pemerintah berhasil memaksimalkan pemanfaatan potensi yang adasecara maksimal, maka pajak merupakan penopang dalam peningkatan pendapatan asli daerah akan semakin meningkat. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi supaya tidak terjadi kecurangan. Karena besarnya pajak dan retribusi tidak hanya sebagai komponen utama untuk meningkatkan PAD, tetapi juga sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Oesi, 2013. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang*. [jurnal]. Universitas Brawijaya.malang.
- Andita Puspita Wardhani. (2011). *“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005-2010”*. Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina. (2011). *“Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005- 2009”*. Skripsi. Institut Manajemen Telkom Bandung.
- Anzar, Muhammad Karya Satya, 2008. *Analisa Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. [Tesis Pascasarjana]. Universitas Sumatera Utara dipublikasikan.
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Bisma, I Dewa Gde & Hery Susanto. (2010). *“Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007”*. Jurnal. GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Mataram.
- Elmi, Bachrul, 2002. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya Dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Otonomi Daerah, **Jurnal Ekonomi dan Keuangan** Volume 6, Nomor 4.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Landiyanto. E. A, 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Erlangga. Surabaya. Vol. 1
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Nasir dan Darlis. 2012. Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Al Fino Losa*. Universitas Negeri Padang. Padang. Vol 1
- Republik Indonesia. 1975. Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*. 1975
- _____. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1975. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian kuantitatif & kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Sumarsono, Hadi. (2009). *Analisis kemandirian otonomi daerah: Kasus kota malang (1999 – 2004)*. *JESP Vol. 1, No. 1, 2009*
- Suryaningrum, Diah Hari., 2003, *Kinerja Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, Vol. 3 No. 1, Hal 1-5.